

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama Pola bindalmin dan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Praktek. (Bandung: Mandar Maju. 2013). hal.2
- Alhabsyi husen, Kamus Alkausar, (Surabaya: Darussagaf, 1997),hal 591
- Harahap M. Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 29
- Kartini Kartono, “Patologi Sosial: Jilid I ”, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014 hal.21
- Kartini, Gangguan-gangguan Pshikis, Sinar Baru, Bandung, 1991. hal 15
- L.J. Van Apeldoorn, Pengantar ilmu hukum, (Jakarta: Pradnya Pramita 1993) hal 222
- MA. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. hal 8.
- Muhammad Abdul Kadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal 41
- Ratna, Arha Windari, Hukum perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal 17
- Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 9
- Sri Widoyati, Anak dan Wanita dalam Hukum, (Jakarta: LP3ES, 1983), hal 48
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. PT. Rineka Cipta. Jakarta, 1994. hal 7
- Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, UMM Press, Malang, 2020 hal 01

Wardah Sri dan Sutiyoso Bambang. Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 30 dan 32

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan Indonesia, (Jakarta: Sumut Bandung 1980), hal 88

Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Sumut Bandung 1980) hal 7

Yusuf ad-Durai wisy, Nikah Siri, Mut'ah dan kontrak, (Jakarta: Darul haq, 2010) hal 15-16

Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak & Undang-undang No 1 thn 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat 2

Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1121

Pasal 51 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal 7

Pasal 528 KUUH Perdata: atas suatu hak kebendaan, seorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris

Pasal 584 KUHP Perdata: Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, kadaluarsa

Perturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Syarat dan Tata Cara

Penunjukkan Wali No 29 Tahun 2019, hal 3

Perlindungan HAM Pasal 28 ayat (2) 1945

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 48 KUHPerdata

Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal/artikel

Abdul Hakim, Risdalina, Elviana Sagala, 2020, "Kedudukan wali anak di bawah

umur terhadap harta warisan menurut hukum islam. Jurnal Ilmiah

Advokasi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Vol 08 No.02

Dika, Dwi, Widya, "Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris

Menurut Hukum Perdata (BW) Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum

Indonesia Vol 1 No.3 hal 356

<https://journals.apphi.o.id/index.php/amandemen>

Riduan Syahrini, 1998 Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Cet.

I, Pustaka Kartini Jakarta, hal 83

Siti Nurkayah, "Syarat dan Wewenang Wali Waris", (Studi Komparatif KHI dan

KUH Perdata), Skripsi, STAIN Salatiga, 2014, hal 56.

Internet

JJ.W.R Ria & Zulfikar, Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan

Komplikasi Hukum Islam, Bnadal Lampung, 2018, hal 11 Laurences

Aulina "Hukum Perwalian" <https://www.Kennywiston.tgl> 18/12/24

Misael and Partners, "Kedudukan Hukum Anak Luar

Kawin", ([http://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-luar-](http://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/)

[kawin/](http://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-luar-kawin/)) 18/12/24

Moh. Taufik Makarao, 2004 Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet II PT.

Renika Cipta, Jakarta, hal 124

Mr. Gregor Vonder Burght, Hukum

Waris, <https://www.gramedia.com/Literasi/hukum-waris> tgl 20/12/24

Sopha Maru Hutagalung, 2011, Praktik Peradilan Perdata, Sinar Grafika, Jakarta,
hal. 97